

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



PEMKOT DENPASAR GAET KUNJUNGAN WISATAWAN MELALUI BERBAGAI FESTIVAL



BALI LUNCURKAN KALENDER ACARA PARIWISATA 2024 | Hal. 2

KEMENKUMHAM BALI GANDENG KPU SOSIALISASI PEMILU DI PENJARA

Hal. 12



HAL 3

Bali Luncurkan Kalender Acara Pariwisata 2024

Dinas Pariwisata (Dispar) Bali meluncurkan kalender kegiatan pariwisata yang dikenal dengan *Calendar of Event 2024* dengan total 58 kegiatan yang sudah resmi terdaftar.

“Kegiatan ini yang kami dorong untuk bagaimana wisatawan tinggal lebih lama dan juga menarik wisatawan untuk datang pada bulan-bulan yang kami sampaikan, setiap bulan itu ada kegiatan, jumlahnya 58 event,” kata Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemyayun di Denpasar, Selasa.

Ia mengakui bahwa daftar kegiatan dalam kalender pariwisata 2024 lebih sedikit dari 2023 yang 66 kegiatan, namun jumlah saat ini masih akan terus bertambah seiring dengan pengajuan-pengajuan penyelenggara lainnya.

Selain itu, kegiatan pertemuan dan rapat pemerintah baik skala nasional maupun internasional turut mempengaruhi, di 2024 sejauh ini yang menjadi sorotan Dispar Bali adalah ASIA PACIFIC

Tourism, Hospitality Summit & Digital Brand Award 2024, Pacific Academy of Ophthalmology Congress, dan World Water Forum 2024.

Selebihnya, kata Tjok Pemyayun tak jauh berbeda dengan kegiatan seni, budaya, dan olahraga rutin yang diadakan di seluruh kabupaten/kota seperti Pesta Kesenian Bali, PICA Fest, Maybank Marathon, Ubud Food Festival, Omed-omedan, dan lain-lain.

Pada tahun sebelumnya Dispar Bali juga membuat kalender pariwisata agar wisatawan tak kebingungan memilih jadwal berwisata dan mengisi waktu ketika berada di Pulau Dewata, dari sana mereka mendapati 40-50 persen kunjungan wisatawan bertambah dinilai berkat jadwal kegiatan



Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemyayun saat peluncuran kalender pariwisata 2024 di Denpasar, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

yang tertata jelas.

“Makanya event yang dilakukan tahun ini kita minta dia harus menghitung jumlah pengunjungannya berapa, dampaknya apa, dan transaksi berapa,” ujar Tjok Pemyayun.

Menurutnya dengan pendataan ini maka Pemprov Bali akan semakin mudah memetakan kegiatan milik pemerintah daerah maupun swasta atau organisasi yang potensial atau justru butuh

dorongan lebih.

“Dari tahun lalu sudah kami informasikan bahwa kita harus segera berhitung ini agar bisa mengurusi, mana yang harus didorong mana yang sudah, juga untuk dikirim ke Karisma Event Nusantara (KEN) unggulan kita 10 diajukan oleh kabupaten/kota setelah itu dikurasi, setelah itu dibawa ke Jakarta dan akan dikurasi lagi oleh Kemenparekraf,” kata dia. **(ant)**

Pemprov Bali: Harga Beras Tinggi Bukan Karena Pemilu



Sejumlah petani beristirahat di sela panen raya padi beras merah di persawahan Jatiluwih, Tabanan, Bali, Jumat (16/6/2023). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bali memastikan harga beras yang saat ini tinggi tidak berhubungan dengan momentum tahun politik atau munculnya kegiatan jual beli bahan pokok oleh peserta pemilu dengan harga murah.

“Oh tidak ada, memang kami buat pasar murah untuk menekan inflasi. Ini program pusat, kalau pasar murah pasangan calon beda lagi, kami tidak ada memfasilitasi,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali Wayan Sunada saat

diwawancara di Denpasar, Senin.

“Saya tidak tahu, kami laksanakan program pemerintah gerakan pangan murah yang ada di kami,” sambungnya.

Kepala Distan Pangan Bali menjelaskan naiknya harga beras berasal dari hulu, yaitu beban produksi petani yang terus meningkat sehingga jika pemerintah bertahan dengan harga murah maka petani akan kesulitan.

Sunada menilai jika kenaikan harga beras disebabkan oleh faktor negatif tahun politik maka yang terjadi adalah penipisan stok beras, sementara stok beras di Pulau Dewata melimpah.

“Kita masih punya stok karena tiap bulan kita ada panen sekitar 700 hektar di seluruh Bali, beras kita ada kok cuma harganya saja yang naik, naik sedikit karena modal petani naik, harga pupuk, pestisida, ongkos tenaga kerja, dan distribusi mahal, kalau harganya murah petani kita rugi

dong,” ujarnya.

Diketahui berdasarkan data terakhir Distan Pangan Bali harga beras jenis medium berada di rentang Rp10.900-Rp11.580, beras medium I Rp13.500-Rp14.600, dan beras premium Rp14.500-Rp15.500, sementara pada bulan-bulan sebelumnya belum pernah terdapat harga yang menyentuh harga maksimal seperti kondisi hari ini.

Menurut dia, kondisi ini adalah hal biasa apalagi ketersediaan beras dari medium hingga premium terjaga, masyarakat bisa memilih sesuai kemampuannya, berbeda cerita jika stok beras menipis maka saat itu wajar apabila Pemprov Bali khawatir.

“Biasa saja karena kita selalu kontrol penyosohan, ada sekitar 160 penyosoh aktif saat ini. Di masing-masing penyosohan ada stok beras, saya turun langsung ke lapangan melihat stok beras di penyosohan,” kata dia. **(ant)**

Pemkot Denpasar Gaet Kunjungan Wisatawan Melalui Berbagai Festival

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, terus berupaya menggaet kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik melalui pelaksanaan berbagai festival pada 2024, sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Festival atau kegiatan yang bagus dan layak ditonton, selain meningkatkan kunjungan, juga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Ni Luh Putu Riyastiti di Denpasar, Kamis.

Tercatat total kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ke Kota Denpasar pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.945.896 orang.

"Jumlah wisatawan yang tercatat itu ada yang masuk melalui Pelabuhan Benoa, ada yang menginap maupun yang berkunjung ke sejumlah daya tarik wisata (DTW) di Kota Denpasar," ucap Riyastiti.

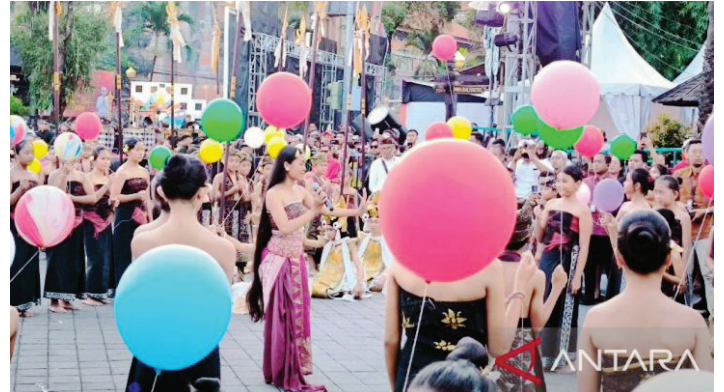
Berdasarkan data survei wisata-



tawan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar bekerja sama dengan Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana, rata-rata lama tinggal wisman di Denpasar selama 9,22 hari dan wisatawan nusantara selama 5,39 hari.

Sejumlah festival dan kegiatan yang dilaksanakan di Kota Denpasar di antaranya Denpasar Festival, Kesanga Festival, Kite Festival, Sanur Village Festival, D'Youth Fest, Maha Bandana Prasadha dan festival di masing-masing kecamatan.

"Festival tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga digelar oleh pihak swasta maupun masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal di



Ilustrasi Suasana pembukaan Denpasar Festival 2023 yang menyedot perhatian warga Kota Denpasar pada akhir Desember 2023. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

Kota Denpasar," ucapnya.

Kegiatan atau festival untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar tak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, tetapi juga organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya dengan melaksanakan kegiatan susur mangrove dan lomba mancing.

"Kesanga Festival dengan pawai ogoh-ogohnya menjelang Hari Nyepi merupakan tradisi

yang unik dan kami berharap mampu mendongkrak kunjungan wisatawan," ujar Riyastiti.

Riyastiti menambahkan, melalui berbagai kegiatan dan festival yang dilaksanakan di Kota Denpasar, tak saja untuk mendukung pariwisata berkualitas, sekaligus untuk mengajak generasi muda agar turut melestarikan budaya dan mempertahankan pariwisata secara berkelanjutan. (ant)

Pemkot Denpasar Putuskan Beri Insentif Pada Tarif Pajak Hiburan Tertentu Jadi 15 Persen



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara berfoto bersama jajaran pelaku usaha yang bergerak di jasa hiburan tertentu usai rapat mendengar pendapat terkait tarif pajak, di Denpasar, Rabu (24/1/2024). ANTARA/Ni Luh Rhismawati

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar, Bali memutuskan untuk memberikan insentif fiskal terkait pengenaan pajak hiburan tertentu dengan tarif menjadi 15 persen dan tidak mengikuti tarif 40-75 persen sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Denpasar, Rabu,

mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan atas usulan yang disampaikan para wajib pajak yang bergerak di sektor hiburan tertentu (karaoke dan spa) di Denpasar.

Jaya Negara menyampaikan sebelumnya berdasarkan hasil rapat secara virtual (zoom meeting) yang melibatkan Kementerian

Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa pemerintah daerah boleh memberikan insentif fiskal terkait pajak hiburan tertentu ini.

"Wali Kota boleh memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak dengan catatan harus melakukan rapat dengan pendapat dengan wajib pajak," katanya di sela-sela acara pertemuan dengan pelaku usaha karaoke dan spa di Kota Denpasar ini.

Oleh karena itu, melalui acara pertemuan yang digelar di Gedung Sewaka Dharma Denpasar tersebut, ia mengundang kehadiran semua pelaku usaha di sektor hiburan tertentu di Kota Denpasar, yakni 11 pelaku usaha karaoke dan 38 pelaku usaha spa.

"Tidak boleh jika orang per orang yang datang ke Kantor Wali Kota Denpasar untuk meminta keringanan pajak," ujarnya pula.

Hasil dari kesepakatan tarif pa-

jak 15 persen tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar yang akan rampung dalam waktu sebulan ke depan.

Dalam perwali itu, juga akan dicantumkan peraturan peralihan yang di antaranya mengatur bahwa tarif pajak hiburan tertentu sebesar 15 persen juga berlaku mulai Januari 2024, tidak saja berlaku sejak saat perwali ditetapkan.

Jaya Negara mengatakan hal itu karena sebelumnya Pemkot Denpasar telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Dalam perda itu mengatur pengenaan tarif pajak yang besarnya sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dengan tarif pajak hiburan 40 persen," ujarnya. (ant)

Pemkab Badung Terus Lakukan Pengendalian Inflasi Daerah

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali terus melakukan berbagai upaya untuk menekan inflasi daerah seiring dengan ditetapkannya Badung sebagai Kabupaten Indek Harga Konsumen (IHK).

“Menjadi Kabupaten IHK juga ada konsekuensi bagi daerah, yaitu harus dapat mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah pusat yang sesuai Keputusan Menteri Keuangan, sasaran inflasi tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,5+1 persen,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Badung di Mangupura, Selasa.

Ia menjelaskan sejumlah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil yaitu dengan melakukan evaluasi dan mengoptimalkan implementasi peta jalan pengendalian inflasi di Kabu-

paten Badung.

Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara berkesinambungan, koordinasi secara intensif, dan menyelenggarakan program-program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan APBD, sehingga aspek produksi, distribusi dan ekspedansi tetap terjaga dengan baik.

“Kami juga melakukan upaya pengendalian inflasi melalui optimalisasi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif,” kata dia.

Wabup Badung Ketut Suiasa mengatakan ditetapkannya Badung sebagai Kabupaten IHK akan membawa dampak positif atau keuntungan yaitu memiliki angka inflasi sendiri sebagai indikator pembangunan ekonomi, penyusunan APBD dan penetapan UMK dan dapat mengawasi



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rakor High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (16/1/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

pergerakan harga barang/jasa yang menjadi pemicu inflasi/deflasi.

Menurutnya, TPID setempat juga akan dapat lebih mudah menentukan kebijakan pengendalian inflasi, dan bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia mengungkapkan pihaknya

juga telah menyiapkan sejumlah rencana untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga barang menjelang hari-hari besar keagamaan di Bali seperti Hari Raya Galungan dan Kuningan, Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1946, dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. (adv)

Pemkab Badung Apresiasi Pengoperasian SPKLU Tenaga Surya Di Kawasan Kuta



Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa memberikan sambutan saat menghadiri peresmian Soft Launching SPKLU Solar Charging Station di Kuta, Bali, Selasa (16/1/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mengapresiasi dan mendukung pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) tenaga surya pertama di kawasan Kuta yang merupakan pusat aktivitas pariwisata di Pulau Dewata.

“Pembangunan SPKLU tenaga surya ini menjadi sejarah baru bagi Badung dalam upaya menjaga kualitas lingkungan melalui sektor transportasi. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersama pemerintah telah bersama-sama bersinergi untuk

membangun suasana positif dan kondusif dan lingkungan yang sehat melalui kondisi udara yang bersih dan sehat,” ujar Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa di Badung, Selasa.

Ia mengatakan polusi udara dan emisi memang menjadi tantangan bersama saat ini. Badung sebagai daerah tujuan wisata dari segi transportasi memiliki kepentingan dalam menjaga kualitas lingkungan dan udara yang sehat.

Menurutnya, walaupun saat ini tingkat kualitas udara di Badung masih tergolong baik, namun ke depan seiring berkembangnya ekonomi dan berdaya masyarakat maka perkembangan moda transportasi akan tumbuh semakin cepat dan berpengaruh pada kualitas udara.

“Untuk itu, sesuai arahan pemerintah pusat dan Provinsi Bali, Pemkab Badung bersama masyarakat mendorong peralihan kendaraan transportasi dari

berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai,” kata dia.

Ketut Suiasa menjelaskan Pemkab Badung juga sudah menjadi pelopor dalam menggunakan kendaraan listrik dengan mengalokasikan operasional kendaraan berbasis listrik yang akan terus didorong agar semakin masif berkembang di Badung, dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan udara.

“Kendaraan listrik ini memiliki banyak manfaat, baik dari nilai ekonomis, efisiensi, mengurangi emisi dan mengurangi kebisingan. Kalau udara sehat maka kualitas kehidupan akan meningkat,” katanya.

Ia berharap fasilitas itu bisa dijaga dan dirawat dengan baik dan menjadi bentuk sinergi yang bagus, karena ini kolaborasi antara swasta, pemerintah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kuta. (adv)

Pemkab Badung Bali Segera Rumuskan Kebijakan Pengurangan Pajak Hiburan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali segera merumuskan kebijakan dan instrumen hukum untuk mengurangi tarif pajak hiburan yang mengalami kenaikan 40-75 persen dan dianggap memberatkan para pelaku pariwisata setempat yang memiliki usaha di bidang hiburan.

"Hal itu menjadi keberatan teman-teman pelaku pariwisata yang bergerak di bidang usaha ini. Oleh sebab itu, kami sedang mencoba merumuskan instrumen hukum untuk membantu atas keberatan-keberatan pelaku pariwisata dengan mencari celah hukum dalam rangka meringankan sesuai dengan kebijakan fiskal kami," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, di Mangupura, Kamis.

Sebelum penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak hiburan tertentu di wilayah Badung dipatok sebesar 15 persen.

Untuk itu, setelah mengikuti pertemuan virtual dengan Men-

teri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wamenkeu Suahasil Nazara terkait penyamaan persepsi tentang pajak hiburan tertentu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Sekda Adi Arnawa memerintahkan Plt Kepala Bapenda,

Kabag Hukum, dan Kadisparda Badung untuk segera merumuskan pengurangan dan keringanan pajak hiburan secara jabatan.

"Kalau kami tetap menggunakan tarif 15 persen, maka akan terjadi pengurangan sebesar 25 persen dari tarif batas bawah 40 persen," kata dia lagi.

Menurutnya, berdasarkan kebijakan tersebut pada akhirnya nanti pembayaran pajak hiburan tertentu di Kabupaten Badung akan masuk ke angka 15 persen sesuai dengan tarif yang lama.

"Pola inilah yang akan secepatnya dirumuskan oleh Pemkab Badung, sehingga pemerintah daerah bisa segera

mengundang pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi terkait tarif pajak hiburan tertentu di Kabupaten Badung," kata Sekda Adi Arnawa.

Ia menambahkan, meskipun kebijakan tersebut dinilai akan mempengaruhi target pendapatan asli daerah, namun Pemkab Badung memiliki perhatian yang tinggi terhadap perkembangan pariwisata di Bali atau Badung di masa pemulihan pascapandemi COVID-19.

Oleh karena itu, pihaknya tidak hanya berpikir untuk peningkatan PAD, tapi bagaimana juga dapat mempertimbangkan aspek sosial dan aspek sosiologis pengusaha yang sedang baru bangkit, karena itu dinilai juga akan berdampak multidimensional. (adv)



Sekda Kabupaten Badung Adi Arnawa memberikan keterangan sesuai mengikuti zoom meeting terkait penyamaan persepsi tentang pajak hiburan tertentu, Kamis (18/1) di Puspem Badung, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Pemkab Badung Manfaatkan Pemasaran Digital Untuk Majukan UMKM

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mengajak pelaku UMKM di wilayahnya untuk merambah pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan pemasaran secara digital untuk meningkatkan omzet dan memajukan usahanya.

"Kami berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM dalam meningkatkan kemampuan pemanfaatan digital salah satunya melakukan kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk UMKM," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut

Suiasa saat kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk di Mangupura, Jumat.

Suiasa mengatakan kolaborasi yang dilakukan salah satunya melalui kegiatan pelatihan UMKM bertema "Go Digital, Digitalisasi Usaha Menuju UMKM Badung Naik Kelas" itu diharapkan dapat memajukan sektor UMKM di wilayah Badung.

Ia menjelaskan pelatihan itu juga menjadi suatu pembuktian upaya pemerintah dalam melaksanakan visi misi Kabupaten Badung dalam memberdayakan pelaku UMKM dengan pola strategi 5M.

"5M itu dilakukan dengan memperhatikan Manajemen, Man atau pelaku UMKM, Money atau permodalan, Material dan Marketing yang dilanjutkan dengan pola 3-si yakni Adaptasi, Kolaborasi dan Inovasi," kata dia.

Wabup Badung mengatakan pihaknya juga memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh permodalan mudah melalui KUR serta BUMDes di masing-masing

desa untuk memberikan kredit bunga rendah.

Menurutnya, saat ini pemerintah juga sedang membuat program subsidi yang ditujukan untuk bunga kredit pinjaman UMKM yang dengan besaran pinjaman Rp25 juta.

"Melalui Diskop UKM kami sudah membuat konsep dan sedang merancang Perbupnya, segi permodalan, membuat satu kebijakan dengan nama SIDI KUMBARA atau INOVASI, SUBSIDI, KREDIT USAHA MIKRO, BADUNG SEJAHTERA) sebagai wujud komitmen kamu dalam upaya kemajuan UMKM," kata dia.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan I Made Widi-ana mengungkapkan Pemkab Badung sangat memperhatikan perkembangan UMKM dalam hal permodalan, pemasaran dan promosi produknya. (adv)



Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa saat acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. sekaligus membuka secara resmi Pelatihan UMKM di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat (19/01). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Bupati Giri Prasta Dampingi Kapolda Bali Meninjau Pembangunan Asrama dan Poliklinik Polres Badung

BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa pembangunan asrama dan poliklinik Polres Badung yang bersumber dari dana belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp 24,8 miliar merupakan wujud konkret dukungan dan komitmen Pemkab Badung dalam memberikan fasilitas kepada Polri beserta jajaran sampai ke tingkat bhabinamtibmas, agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat luas.

Dengan adanya fasilitas asrama dan poliklinik yang baru ini, diharapkan mampu meningkatkan potensi kinerja anggota Polri khususnya Polres Badung dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

“Bagi kami tempat yang representative, nyaman, layak untuk dihuni, layak sebagai

kantor dan fasilitas juga ada, merupakan tanggung jawab kita semua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri,” ujar Bupati Giri Prasta bersama Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono sesuai mendampingi Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra meninjau pembangunan asrama dan poliklinik Polres Badung, Selasa (16/01/2024).

Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kabupaten Badung, Asrama Polres Badung ini terdiri dari 4 lantai dan memiliki 27 unit ruangan.

Masing-masing unit terdiri atas 2 kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, 1 unit AC dan 1 unit TV. Sementara polikliniknya terdiri atas 3 lantai.

Lantai 1 terdiri atas ruang IGD, ruang rekam medik, ruang tunggu, ruang spoel hoek, ruang linen, ruang Gudang obat,



Bupati Giri Prasta (tiga kiri) bersama Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono (kiri) sesuai mendampingi Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra (dua kiri) meninjau pembangunan asrama dan poliklinik Polres Badung, Selasa (16/01) ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

ruang farmasi, ruang laktasi dan ruang bermain anak.

Di Lantai 2 ada ruang poli umum, ruang poli KIA, ruang poli gigi, laboratorium, ruang

sampling dan gudang. Sementara lantai 3 terdapat ruang pertemuan, ruang administrasi, ruang kepala klinik, ruang CSSD dan dapur. (adv)

Bupati Bersama Pegawai Pemkab Badung Ikuti Tes Urine Narkoba



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Pimpinan Perangkat Daerah dan Pegawai Pemkab Badung mengikuti tes urine narkoba, Jumat (19/1) di Puspem Badung

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Pimpinan Perangkat Daerah dan Pegawai Pemkab Badung mengikuti tes urine narkoba, Jumat (19/1) di Puspem Badung.

Kegiatan tes urine ini merupakan kerja sama Pemkab Badung dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

Pemeriksaan dilakukan langsung jajaran Ditresnarkoba Polda Bali bersama dokter polda

bali dipimpin oleh Ditresnarkoba Polda Bali Kombes Pol. Iwan Eka Putra.

Tes urine merupakan komitmen Bupati Badung dalam mewujudkan Pemerintah Kabupaten Badung yang sehat, berprestasi dan tanpa narkoba.

Bupati Giri Prasta atas nama pemerintah dan masyarakat badung menghaturkan terima kasih kepada Polda Bali yang telah melaksanakan tugas negara sesuai arahan Bapak Presiden, bagaimana mewujudkan kabupaten badung yang sehat, berprestasi, tanpa narkoba.

“Sosialisasi tentang bahaya narkoba terus kami lakukan melalui kegiatan HUT Sekaa Teruna, maupun kegiatan masyarakat. Selalu kami sampaikan jangan sampai kita kena narkoba maupun narkotika. Jangan sampai mabuk-mabukan dan mengganggu ketertiban umum. Ini komitmen kami, bagaimana kami men-

dukung penuh Ditresnarkoba Polda Bali melakukan tes urine ini. Bagi saya narkoba itu bisa selesai oleh diri sendiri. Rehabilitasi pun juga kami gerakkan,” jelas Giri Prasta, seraya menambahkan bila orang yang tidak mau berhenti mengkonsumsi narkoba, maaf maka orang itu menjadi orang yang paling berbohong di dunia.

Ditresnarkoba Polda Bali, Kombes Pol. Iwan Eka Putra menjelaskan, dalam rangka mendukung program Bupati Badung dengan tagline “Sehat, Berprestasi, Tanpa Narkoba”, Polda Bali melalui Ditresnarkoba melakukan tes urine bagi pegawai Pemkab Badung.

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 260 orang pegawai yang dilakukan oleh 50 personel dari Polda Bali. Dengan hasil adalah tidak ditemukan satu orangpun dari pegawai Pemkab Badung yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. (adv)

Sekda Adi Arnawa Hadiri Pelantikan 1485 PTPS Badung

SEKDA Badung Wayan Adi Arnawa menyaksikan pelantikan 1485 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Badung, Senin (22/01/2024) bertempat di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.

Acara pelantikan ini bukan hanya sebuah formalitas, melainkan sebuah komitmen bersama untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Badung.

Karena pengawas TPS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap tahapan pemilihan berlangsung dengan adil, bersih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sebagai pengawas TPS, tugas dan tanggung jawab yang saudara emban tidaklah ringan, saudara adalah ujung tombak dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat lokal. Kredibilitas dan integritas

saudara-saudara akan menjadi penentu sejauh mana proses pemilihan berjalan lancar dan dipercaya oleh masyarakat,” ujar Sekda Adi Arnawa.

Menurut Sekda Adi Arnawa keberadaan PTPS menjadi instrumen penting yang akan ikut menentukan kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara.

Oleh sebab itu anggota PTPS dituntut agar aktif dan progresif, mengerti tugas dan wewenangnya sehingga memaksimalkan perannya dengan baik.

Disebutkan juga bahwa pengetahuan dan keterampilan PTPS menjadi faktor utama dalam mewujudkan integritas proses dan hasil pemungutan serta penghitungan suara.

“Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara agar melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan ketulusan. Jadilah pengawas



Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri pelantikan 1485 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Badung, Senin (22/01). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung)

yang bersih dari segala bentuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga hasil pemilihan yang nantinya diumumkan benar-benar mencerminkan suara dan kehendak rakyat. Teruslah mengembangkan profesionalisme, meningkatkan

pemahaman terkait aturan dan mekanisme pemilihan, serta menjalin koordinasi yang erat dengan pihak terkait. Sebuah pemilihan yang sukses adalah hasil dari kerjasama dan sinergi seluruh pihak,” pungkasnya. (adv)

Wabup Suiasa Hadiri Rakor Kadin



Wabup Suiasa menghadiri Rakor Kadin Kabupaten Badung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Bupati, Selasa (23/1). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

MEMPERCEPAT pertumbuhan UMKM di Kabupaten Badung, para pelaku usaha diharapkan bisa mendapatkan ijin sesuai dengan standar yang ada dan dicarikan akses permodalan baik dari lembaga keuangan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) dengan dukungan fasilitas seperti itu UMKM di Badung bisa tumbuh dengan baik dan berdampak pada peningkatan ekonomi Kabupaten Badung.

Hal itu dikatakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung IB Gede

Arjana saat membuka Rakor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Bupati, Selasa (23/1/2024).

“Kami berharap kepada semua elemen terkait untuk memberikan dukungan terhadap pertumbuhan UMKM di Badung karena ketika UMKM itu berkembang dengan baik tidak saja meningkatkan ekonomi juga penyerapan tenaga kerja,” ujar Ida Bagus Gede Arjana.

Wabup Suiasa menekankan pelaku UMKM agar selalu berinovasi dalam melakukan usaha-usaha yang digeluti, dan diharapkan hasil UMKM bisa di adopsi oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Sebagai partner kerja Pemkab Badung, diharapkan akan terjalin komunikasi yang berkelanjutan antara Kadin dan Pemkab Badung.

“Kebijakan yang diambil oleh Pemkab Badung juga merupakan

hasil komunikasi dan diskusi dengan Kadin. Dari diskusi yang dilakukan tadi kita sepakat untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum sehingga pelaku UMKM akan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya,” harapnya.

Sementara Ketua Kadin Badung I Gede Putra Adnyana mengungkapkan sebagai partner pemerintah tentu masih menemui beberapa hambatan yang perlu dicarikan jalan keluar. Dalam rakor saat ini juga berharap Kadin Badung dilibatkan lebih maksimal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Saya berharap pelaku UMKM dalam pengurusan ijin bisa dimudahkan sesuai aturan yang ada. Selama ini kami sudah banyak dibantu dalam perizinan namun kedepan kami berharap dalam pengurusan ijin bisa lebih disederhanakan tapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya. (adv)

Badung Bangun Sarana dan Prasarana Jajaran Polda Bali

BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung selalu berbakti kepada negara, cinta kepada POLRI, dan sayang kepada masyarakat Bali.

Oleh karena itulah maka Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen penuh untuk selalu hadir dan tegak lurus dalam mendukung tugas pokok dan fungsi POLRI.

Salah satunya dengan cara membantu pembangunan sarana prasarana pendukung bagi jajaran Polda Bali berupa Bangunan Rumah Dinas Kapolda Bali, Mako Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Poliklinik dan Asrama Presisi Polres Badung, dan Pengaspalan Mako Satbrimob Polda Bali.

"Bangunan rumah jabatan Kapolda Bali ini bernilai Rp 25 miliar lebih dan akan menjadi fasilitas bagi siapapun yang nantinya menjabat sebagai Kapolda Bali, dan luar biasanya Bapak Kapolda sekarang yaitu Bapak Ida Bagus Kade Putra Narendra yang mem-

buat rumah jabatan ini. Sementara itu gedung Polres Bandara nilainya Rp 20 miliar lebih, asrama poliklinik Polres Badung Rp 24 miliar lebih dan pengaspalan jalan lingkungan Mako Brimob Tohpati Rp 2 miliar lebih. Jadi total anggarannya adalah Rp 72 miliar lebih," jelas Bupati Giri Prasta saat menghadiri acara peresmian bangunan Rumah Dinas Kapolda Bali, Mako Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Poliklinik dan Asrama Presisi Polres Badung, dan Pengaspalan Mako Satbrimob Polda Bali, di Denpasar, Rabu (24/01/2024).

Bupati Giri Prasta juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung akan terus menjalin komunikasi yang bersinergi dengan Polda Bali untuk melengkapi kebutuhan jajarannya sampai ke tingkat Polsek. Dengan ini diharapkan akan terwujud Bali yang aman, nyaman dan tertib. Sehingga akan berdampak positif



Bupati Giri Prasta menghadiri acara peresmian bangunan Rumah Dinas Kapolda Bali, Mako Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Poliklinik dan Asrama Presisi Polres Badung, dan Pengaspalan Mako Satbrimob Polda Bali, di Denpasar, Rabu (24/01). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Bali. "Itulah maka kami di Badung tegak lurus dengan Polri, karena kami cinta pada Polri dan sayang kepada masyarakat pulau dewata. Karena kami sadar siapapun yang menjadi pemimpin baik

Gubernur Bupati/Walikota harus dekat dengan Forkopimda. Dan kami sudah contohkan itu, dengan dekatnya kami dengan Forkopimda, astungkara PHR naik dan masyarakat Badung/Bali akan semakin sejahtera dan Bahagia," pungkasnya. (adv)



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat mendampingi Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Kapolda Bali Irjen. Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra pada acara kolaborasi gerakan kebersihan lingkungan, Jumat (26/1/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali berkomitmen terus menjaga dan berbenah dalam menata kawasan wisata Pantai Kuta agar terhindar dari kesan kumuh sehingga keberlanjutan industri pariwisata setempat bisa terjaga dengan baik.

"Terkait dengan penataan dan pemeliharaan Pantai Kuta, kami pastikan nanti dilakukan dengan baik. Ini harus kami jaga sesuai dengan arahan Bapak Pj Gubernur Bali bahwa pintu masuk Bali adalah Kuta dan wajah

Bali adalah Kuta," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat mendampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam kegiatan kolaborasi gerakan kebersihan lingkungan bersama di Kuta, Jumat.

Ia mengatakan dalam pengelolaan Pantai Kuta pihaknya mengajak organisasi perangkat daerah terkait, jajaran kecamatan hingga desa adat untuk membangun komunikasi dan bersinergi agar wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke

Pemkab Badung Jaga Kawasan Wisata Pantai Kuta

Kuta selalu merasa nyaman dan betah.

Menurutnya Pj Gubernur juga telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada Badung sehingga pihaknya juga akan segera mengadakan rapat dengan seluruh jajaran agar arahan Pj Gubernur Bali yang diberikan dalam kegiatan itu bisa diimplementasikan dengan baik.

Bupati Giri Prasta menjelaskan sektor pariwisata membutuhkan sentuhan yang harus dilakukan dengan baik sehingga tindak lanjut terhadap penataan Pantai Kuta juga harus jelas.

"Oleh karena itu, kami akan segera mengadakan pertemuan dengan jajaran desa adat untuk mencari solusi bersama karena kami Pemkab Badung bersama

masyarakat Desa Adat Kuta wajib berbenah sesuai arahan bapak Pj Gubernur Bali," kata dia.

Pada kegiatan itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengungkapkan Pantai Kuta merupakan tempat yang luar biasa. Namun ada kesan, tempat yang sudah direvitalisasi oleh Pemkab Badung dengan menggunakan dana yang tidak sedikit itu terkesan kumuh.

"Karena Pantai Kuta ini dikelola oleh desa adat, saya minta tolong ini dijaga dengan baik yang sudah dibuat bagus ini. Apalagi Bapak Bupati Badung sudah begitu luar biasa memikirkan Kuta, ini yang harus kita jaga, kawasan Kuta yang luar biasa, wajahnya Bali," kata Sang Made Mahendra Jaya. (adv)

Pemkab Badung Berikan Dukungan ke Generasi Muda Berprestasi

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, memberikan dukungannya kepada para generasi muda yang berprestasi di wilayah tersebut, salah satunya adalah tim Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMA Negeri 1 Mengwi, Badung.

“Mereka akan berkompetisi di Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPI-TEx 2024) in Thailand Inventors’ Day 2024, jadi kami memberikan dukungan penuh berupa dukungan moril dan materiil yaitu biaya akomodasi dan uang saku,” ujar Bupati Badung Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan pemberian dukungan dan apresiasi kepada generasi muda yang berprestasi, bertalenta, dan inspiratif, adalah langkah yang penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan pendidikan yang positif.

“Adanya penghargaan dan pengakuan akan memberikan motivasi tambahan kepada talenta-talenta muda kami untuk terus bekerja keras dan mencapai prestasi yang lebih tinggi,” katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan dengan pemberian perhatian dari Pemkab Badung maka generasi muda seperti tim KIR SMA Negeri 1 Mengwi merasa dihargai dan diakui atas usaha dan dedikasinya.

Hal tersebut juga akan menjadi pendorong bagi siswa lainnya untuk terus meningkatkan kinerja akademik dan non-akademik mereka, demi kemajuan daerah dan bangsa kedepannya.

“Jadi anak-anak ini akan berangkat ke Thailand pada 31 Januari mendatang untuk ikut berkompetisi memperkenalkan karya ilmiah berjudul LAST-D, Laboratory Assistant for Prediction Diabetes Disease with Machine Learning. Jadi secara pribadi saya sangat mengapresiasi



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat menerima audiensi team KIR SMA Negeri 1 Mengwi di Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung, Senin (29/1/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

dan memberikan dukungan penuh kepada mereka,” ucapnya.

Pada kesempatan yang lain Pemkab Badung juga memberikan apresiasi dan dukungan kepada generasi muda yang aktif terlibat dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia Bali 2024 yang diselenggarakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa, ajang tersebut dapat menjadi teladan dan memberi pengaruh positif pada generasi muda agar menjadi SDM yang handal, berkualitas, kompetitif, dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas serta berwawasan budaya. **(adv)**

Pemkab Badung Bangun Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung



Bupati Giri Prasta bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna dan Kepala Kejaksaan Negeri Badung Suseno saat peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung, Selasa (30/1/2024). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali mendukung kelengkapan sarana prasarana untuk jajaran Kejaksaan Negeri Badung meliputi pembangunan asrama pegawai, tempat parkir motor, pemasangan kanopi dan kamera CCTV.

“Pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri

Badung ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kami kepada Kejari Badung atas sinergi dan kerja sama yang sangat baik selama ini,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung Griya Adhyaksa Narendra di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan berbagai sarana prasarana yang diberikan Pemkab Badung melalui dengan dana belanja hibah pada APBD perubahan Badung Tahun Anggaran 2023 senilai sekitar Rp7,3 miliar itu selaras dengan kebijakan pembangunan yang senantiasa patuh dan taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung upaya penegakan hukum.

Melalui dukungan itu, Pemkab Badung berkomitmen akan selalu tegak lurus dengan Kejaksaan dan selalu berpihak pada regulasi hukum dan menjalin berbagai kerja sama dan koordinasi mengingat Badung merupakan daerah tujuan pariwisata internasional sehingga mengharuskan adanya jaminan kepastian hukum dalam upaya menciptakan iklim investasi yang baik.

“Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan dan jajaran Forkopimda lainnya, kami di

Badung menjadi semakin kuat dan bisa mencapai dan melampaui target pembangunan di segala sektor,” kata dia.

Bupati Giri Prasta menegaskan seluruh jajaran pemerintahan di Badung juga telah mendapatkan pendampingan hukum, sehingga selalu merasa nyaman dan tidak khawatir dalam bekerja untuk melayani masyarakat.

“Kami tidak pernah berpikir sedikit pun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itulah yang kami ikhtiarkan dan kami jadikan komitmen agar Badung menjadi Badung hebat dan Badung juara,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna mengungkapkan pihaknya memberi apresiasi atas terjalinnya sinergitas yang sangat kuat antara Pemkab Badung bersama dengan kejaksaan dan seluruh jajaran Forkopimda yang ada di wilayah tersebut. **(adv)**

Pj Bupati Gianyar Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD

PENJABAT Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gianyar, Provinsi Bali.

"Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044 disusun guna memacu pergerakan perekonomian," kata Pj Bupati Gianyar di ruang sidang utama DPRD Gianyar sebagaimana siaran pers Diskominfo Gianyar, Kamis.

Dia mengatakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044 disusun untuk mewujudkan pembangunan industri kabupaten sebagai pilar dan penggerak perekonomian, dan pemerataan pembangunan industri dalam mencapai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rancangan peraturan daerah tentang Sistem Pemerintahan Ber-

basis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gianyar, disusun untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Anom Masta dihadiri 22 anggota DPRD Kabupaten Gianyar.

Adapun ke tiga Ranperda yang disampaikan ialah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044, Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gianyar, dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah ke PT BPD Bali.

Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT BPD Bali disusun dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

"Penyertaan Modal Daerah Kepada PT BPD Bali juga untuk



Suasana sidang DPRD Gianyar saat Pj Bupati I Dewa Tagel Wirasa menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda). ANTARA/HO-Humas Gianyar

meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Dewa Tagel Wirasa juga berharap Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat segera mendapatkan pembahasan melalui rapat-rapat kerja pansus sehingga Ranperda tersebut dapat

segera ditetapkan.

"Terima kasih kepada pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Gianyar, karena telah berkomitmen dan mampu menunjukkan kerjasama kemitraan antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga dengan baik dan harmonis, dalam bingkai Pemerintah Kabupaten Gianyar," ujar dia. **(ant)**

Pemkab Tabanan Cegah Stunting Dengan Program "Bungan desa"



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya disambut dengan meriah oleh anak-anak sekolah di Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan, Bali, Selasa (30/1/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Tabanan)

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan, Bali menekan angka stunting di daerah itu dengan melaksanakan program 'Bungan desa' atau Bupati ngantor di desa.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Tabanan, Selasa, mengatakan program 'Bungan desa' merupakan program ungu-

lan inisiasi Pemkab Tabanan yang juga akan berdampak positif bagi perkembangan UMKM, IKM dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkap saat Bupati Tabanan kembali menjalankan program Bungan desa ke 42 di Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan.

Selain fokus untuk memberi-

kan pelayanan bagi masyarakat, bidang layanan administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga lingkungan, kedatangan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan itu memberikan bantuan bagi keluarga stunting yang ada di desa tersebut.

"Jajaran pemerintah Kabupaten Tabanan hadir dengan tujuan berkantor di Desa Nyitdah ini secara langsung untuk melihat, menyaksikan dan menyerap aspirasi rakyat, seperti apa profil desa dan ternyata memiliki potensi dan kearifan lokal yang luar biasa, tadi ada program tentang pengelolaan sampah dengan kemandirian yang luar biasa," katanya.

Sanjaya menambahkan, dengan rutinitas berkantor di desa, dirinya banyak menimba ilmu dan belajar di desa.

"Saya melihat apa yang terjadi

dan yang ada di desa itu. Sehingga di dalam mengaktualisasikan kebijakan, pemerintah daerah bisa tepat guna, tepat sasaran dan tidak salah. Di Desa Nyitdah ini yang menjadi pokok masalah adalah sampah, bagaimana nanti mewujudkan Desa Nyitdah ini menjadi desa bersih," katanya.

Bupati mengatakan kegiatan berkantor di desa itu sudah ke 42 kalinya dilakukan sejak 2023.

"Harapan kita ke depan, bagaimana desa itu benar-benar tumbuh, dari desa, oleh desa dan untuk desa. Jadi betul-betul desa itu mandiri, nanti pemerintah akan memberikan regulasi dan bantuan yang dibutuhkan. Karena 133 desa potensinya tidak ada yang sama. Maka dengan saya berkantor di desa, perhatian bisa didapatkan, astungkara ini bisa terus kita lanjutkan. Semakin sering berkantor di desa, semakin saya dekat dengan masyarakat," kata Sanjaya. **(ant)**

Bupati Buleleng Jadikan "Command Center" Percontohan Pola Kerja

PENJABAT Bupati Buleleng, Bali, Ketut Lihadnyana menjadikan Buleleng Command Center (BCC) atau Pusat Kendali Buleleng sebagai gedung atau kantor percontohan dengan pola kerja kolaboratif.

"Saya akan fokus untuk mewujudkan pola tersebut (kolaboratif) di Gedung BCC bersama stakeholder di lingkup Pemkab Buleleng," kata Lihadnyana saat meninjau sekaligus menandatangani prasasti peresmian Gedung BCC yang juga sebagai kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti) di Singaraja, Buleleng, Jumat.

Oleh karena itu, guna mewujudkan pola kerja kolaboratif, tata kerja atau pun tata ruangan harus diatur sedemikian rupa.

"Dengan pola kerja kolaboratif, ada efisiensi dan efektivitas yang terjadi. Ini juga telah diatur dengan Permenpan RB terkait pola kerja kolaboratif," katanya.

Lihadnyana menjelaskan BCC juga diharapkan menjadi pusat satu data Buleleng. BCC ini nantinya bukan saja milik pegawai Diskominfosanti, tetapi, BCC ini adalah milik publik. Jika sudah di BCC, publik juga bisa mengakses segala data yang diperlukan. BCC sebagai sentral atau pusat dari seluruh data tentang Buleleng.

"Kalau mewujudkan Buleleng Satu Data, arsitektur dari fitur-fitur harus spesifik dan menjelaskan secara detail gambaran Buleleng," kata Lihadnyana.

Lihadnyana pun mengatakan transisi dari konvensional ke digital merupakan perubahan mendasar. Hasil dari transisi tersebut adalah ketepatan, kecepatan, akurasi dan bukti dukung. Ini perlu dijalankan dengan serius dan berkelanjutan.

"Kita akan terus mengupayakan ini. Kita juga akan fokus untuk menerapkan digitalisasi," kata dia.

Sementara itu, menanggapi



Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat meninjau sekaligus menandatangani prasasti peresmian Gedung BCC yang juga sebagai kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti) di Singaraja, Bali, Jumat. ANTARA/HO-Diskominfosanti Buleleng

keinginan Pj Bupati Buleleng menjadikan BCC sebagai percontohan pola kerja kolaboratif, Kepala Diskominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan mengungkapkan BCC sebagai pusat data membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak.

Kerja kolaborasi tersebut khususnya dari instansi vertikal

dan juga perangkat daerah di Kabupaten Buleleng untuk memberikan data atau memasukkan data ke aplikasi yang telah disediakan oleh Diskominfosanti.

Dengan begitu, data-data yang disampaikan kepada publik khususnya yang datang ke BCC bisa lebih detail. (ant)

Pemkab Jembrana Bantu Dana Pengobatan Korban Tersambar Petir



Potret Rumah Sakit Umum Negara Jembrana, Bali. ANTARA/Gembong Ismadi.

PEMERINTAH Kabupaten Jembrana Bali melalui instansi terkait membantu biaya pengobatan belasan pekerja petik semangka yang tersambar petir beberapa waktu lalu.

"Bupati menginstruksikan untuk memberikan bantuan pengobatan terhadap korban sam-

baran petir. Selain dari kami, juga ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah," kata Direktur RSUD Negara Ni Putu Eka Indrawati di Negara Jembrana Bali, Selasa.

Ia menjelaskan, untuk korban yang menjalani rawat inap, bagi yang mengalami luka berat mendapatkan santunan pengobatan

dari BPBD sebesar Rp5 juta, jika kurang dibantu RSUD Negara.

"Untuk korban yang rawat jalan sepenuhnya kami bantu. RSUD Negara sejak awal tidak meminta biaya pengobatan kepada korban sambaran petir," katanya.

Dia juga mengungkapkan, seluruh korban sambaran petir di areal persawahan Desa Budeng, Kecamatan Jembrana tersebut tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Ia mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan yang menyatakan, belasan orang itu masuk kategori kecelakaan kerja, sehingga yang bisa menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat mereka mengikuti asuransi tersebut.

"Namun seluruh korban tidak tercatat memiliki atau ikut BPJS Ketenagakerjaan, sehingga biaya

pengobatan tidak bisa ditanggung. Sebagai solusi membantu korban, Pemkab Jembrana bersama kami yang membantu mereka," katanya.

Dari 11 korban sambaran petir yang dibawa ke RSUD Negara, katanya, satu orang dirujuk ke RSUD Tabanan, dua orang pulang hari ini, dan sisanya menjalani rawat jalan sejak awal kejadian. Sebelumnya, sebanyak dua belas orang di Kabupaten Jembrana Bali tersambar petir, dan satu orang di antaranya meninggal dunia.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana AKP Agus Riwayanto Diputra mengatakan, peristiwa naas ini terjadi di areal persawahan Subak Kawis Desa Budeng Kecamatan Jembrana sekitar pukul 15.00 wita.

Menurut dia, dua belas orang korban sambaran petir ini merupakan pekerja pemetik semangka yang sedang panen di lokasi. (ant)

Kemenkumham Bali gandeng KPU Sosialisasi Pemilu di Penjara

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2024 kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan.

“Pemilu merupakan sarana untuk kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap warga negara, termasuk warga binaan, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Romi Yudianto di Denpasar, Minggu.

Ia mengharapkan warga binaan dapat memahami dan menjalankan haknya untuk memilih pada Pemilu 2024. Tak hanya itu, sosialisasi dari KPU juga dapat meningkatkan kesadaran warga binaan untuk berpartisipasi dalam ajang demokrasi lima tahun sekali itu.

Dalam sosialisasi itu, perwakilan KPU Badung menyampaikan

informasi terkait jadwal, tahapan, dan tata cara penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain itu, KPU Badung juga memberikan edukasi kepada warga binaan mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam Pemilu.

Berdasarkan data dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah penghuni lapas dan rutan di Bali yang diperbarui pada Minggu (28/1) pukul 11.40 WIB, mencapai 4.059 orang baik tahanan dan narapidana.

Jumlah itu melebihi kapasitas seharusnya mencapai 1.544 orang yang tersebar di 10 lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di Bali.

Ada pun jumlah warga binaan terbanyak berada di Lapas Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung mencapai 1.200 orang dari kapasitas seharusnya 466 orang dan Lapas Narkotika Kelas II-A di Kabupaten Bangli men-



Kemenkumham Bali menggandeng KPU Badung menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2024 kepada warga binaan di Lapas Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (28/1/2024) ANTARA/HO-Kemenkumham Bali

capai 1.140 orang dari kapasitas seharusnya 468 orang.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali membentuk 18 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di Pulau Dewata.

Sebelumnya, Anggota KPU Bali

Ngurah Darmasanjaya menjelaskan TPS Khusus itu untuk memberikan kesempatan bagi pemilih dalam kondisi tertentu agar tidak kehilangan hak pilihnya. KPU Bali mencatat ada sebanyak 3.743 orang terdaftar sebagai pemilih di 18 TPS Khusus itu. (ant)

Menparekraf: Event di Bali 2024 Buka 4,4 Juta Lowongan Kerja



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) berbincang dengan pelaku event dan produk wisata minat Kkhusus, di Badung, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Fikri Yusuf

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pelaksanaan berbagai event baik yang bertaraf daerah, nasional, maupun internasional di Bali akan dapat membantu akselerasi pencapaian target pembukaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024.

“Kita melihat (pemulihan) event based ini bisa memberikan multiplier effect seperti pelaksanaan KTT G20 dan KTT ASEAN. Ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno saat Diskusi Asik Bareng Menparekraf mengenai Event dan Produk Wisata Minat Khusus Bali

di kawasan Kuta, Badung, Selasa.

Selain itu, penyelenggaraan berbagai event itu juga memiliki peranan penting dalam memulihkan perekonomian Bali yang sempat terpuruk karena pandemi COVID-19.

Ia menjelaskan Bali sebagai destinasi wisata favorit bagi wisatawan dari berbagai negara memerlukan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak melalui insentif-insentif seperti pelaksanaan program dan event-event yang berkualitas.

“Pariwisata di Bali ini tentunya membutuhkan insentif-insentif, sentuhan pemerintah, dan membutuhkan kehadiran program-program yang bisa lebih banyak mendatangkan event-event yang berkualitas internasional di Bali sehingga industrinya semakin menggeliat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” kata dia lagi.

Dalam pertemuan tersebut,

Sandiaga Uno berdiskusi dan menyerap berbagai aspirasi dari pelaku produk wisata minat khusus di Bali, seperti terkait dengan harapan kemudahan perizinan penyelenggaraan event, venue untuk penyelenggaraan event dapat diperbanyak serta usulan pelatihan SDM dari kegiatan MICE maupun kegiatan wisata minat khusus.

Terkait hal itu, ia mengungkapkan dalam upaya mempermudah pelaksanaan event di Indonesia, pihaknya tengah mempersiapkan sistem digitalisasi perizinan event. Nantinya, perizinan event yang sebelumnya perlu diurus ke sejumlah instansi tertentu dapat disatukan dalam satu platform.

“Mulai dari perencanaan hingga izin keamanannya, semua di dalam satu ekosistem dan sekarang sedang diujicobakan di beberapa venue,” ujar Sandiaga Uno. (ant)